

## DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP KOREA SELATAN DALAM INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA)

Rina Ariyanthi Dewi

Program Studi Perdagangan Internasional  
Universitas Widyatama  
rina.dewi@widyatama.ac.id

Rizal Budi Santoso

Program Studi Perdagangan Internasional  
Universitas Widyatama  
rizalbudisantoso3@gmail.com

### INFO ARTIKEL

#### Article History

#### Received

13 August 2022

#### Revised

22 August 2022

#### Accepted

30 August 2022

**Keywords:** *economics  
diplomacy; the Indonesia-  
Korea Comprehensive  
Economic Partnership  
Agreement; Indonesia; South  
Korea.*

**Kata Kunci:** diplomasi  
ekonomi; Perjanjian  
Kemitraan Ekonomi  
Komprehensif Indonesia-  
Korea; Indonesia; Korea  
Selatan.

#### Abstract

*This article aims to describe Indonesia's economic diplomacy towards South Korea through the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) which seeks to provide equal benefits as part of balancing Indonesia's national interests. The qualitative approach and the theory of economic diplomacy proposed by Okano-Heijma are used. The results show that Indonesia's economic diplomacy process through IK-CEPA in an effort to increase the value of trade and investment between the two countries. However, after being agreed in 2021, this IK-CEPA cannot yet run because it still takes time for the ratification of the IK-CEPA cooperation.*

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan menggambarkan mengenai diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan melalui Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) yang berupaya untuk memberikan keuntungan yang sama sebagai bagian dari penyeimbangan kepentingan nasional Indonesia. Pendekatan kualitatif dan teori diplomasi ekonomi yang dikemukakan oleh Okano-Heijma digunakan. Pada hasil menunjukkan bahwa proses diplomasi ekonomi Indonesia melalui IK-CEPA dalam upaya untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi diantara kedua negara. Meskipun demikian, setelah disepakati pada tahun 2021, IK-CEPA ini belum dapat berjalan karena masih diperlukannya waktu untuk ratifikasi dari kerja sama IK-CEPA.



## PENDAHULUAN

Meningkatnya saling ketergantungan ekonomi internasional atau globalisasi dan kebutuhan yang lebih besar untuk menemukan solusi yang dinegosiasikan antar negara, seperti sistem keuangan yang stabil, perdagangan terbuka, dan investasi telah mendorong interaksi antar negara yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan ekonomi luar negeri agar lebih strategis (Woolcock & Bayne, 2012:1). Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) menjadi salah satu kerja sama ekonomi strategis yang dapat memberikan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi Indonesia dan Korea Selatan.

IK-CEPA ini diluncurkan pada tahun 2012 yang memulai serangkaian proses negosiasi yang komprehensif. Pada tahun 2014 hingga 2017 proses negosiasi tersebut terhenti dikarenakan tidak tercapai kesepakatannya perdagangan barang dan klausul investasi yang di tawarkan oleh Indonesia sebagai imbalan dari pembebasan bea masuk untuk produk barang yang berasal dari Korea Selatan ke Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2020).

Kesulitan-kesulitan yang ditemui selama negosiasi berdampak tidak langsung terhadap iklim perdagangan, hubungan

investasi, dan pelaku pasar di Indonesia dan Korea Selatan. Menurut data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tren perdagangan kedua negara mengalami penurunan sebesar 51 persen antara tahun 2012 hingga 2017. Perdagangan kedua negara mengalami penurunan terbesar pada tahun 2014-2015. Di sisi lain, jumlah investasi dari Korea Selatan ke Indonesia mengalami penurunan, penurunan terbesar terjadi antara tahun 2013-2014 dan terus berlanjut hingga tahun 2017.

Pada tahun 2018, melalui pertemuan Presiden Joko Widodo dan Moon Jae-in sepakat untuk melanjutkan kembali pembahasan IK-CEPA yang kemudian dilanjutkan oleh Menteri Perdagangan kedua negara yang mengaktifkan kembali perundingan IK-CEPA pada 19 Februari 2019. Kedua belah pihak kemudian mengadakan pembicaraan putaran kedelapan di Seoul, April-Mei 2019; yang kesembilan di Jeju, Agustus 2019; dan perundingan kesepuluh di Bali, 8-10 Oktober 2019 kemudian ditandatangani pada 18 Desember 2020 (Kementerian Perdagangan, 2020).

Dalam IK-CEPA, kedua pihak berkomitmen melakukan kerja sama ekonomi di berbagai bidang, antara lain, industri, pertanian, perikanan, kehutanan, aturan dan

prosedur perdagangan, infrastruktur, teknologi dan inovasi, budaya dan bidang kreatif, serta UMKM (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Bilateral, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai IK-CEPA telah banyak dilakukan dan didapati keterkaitan dengan artikel ini. Seperti Septana & Winanti (2017) yang menggambarkan kerja sama IK-CEPA ini sebagai upaya kedua pemerintah untuk liberalisasi ekonomi yang terbuka sembari melindungi industri dalam negeri. Tiara (2017) mengidentifikasi mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terhentinya perundingan IK-CEPA di tahun 2014. Muchsya (2020) mendeskripsikan mengenai upaya Indonesia dan Korea Selatan dalam meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dalam kerangka *special strategic partnership*. Safitri (2021) menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong Indonesia untuk melakukan reaktivasi IK-CEPA. Sementara itu, Cholif (2022) menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong Korea Selatan untuk menyetujui reaktivasi IK-CEPA yang diajukan oleh Indonesia.

Perbedaan dengan artikel ini yang munculkan kebaruan adalah pada pendekatan yang digunakan terkait diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia untuk

mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih dari kerja sama IK-CEPA yang menjadikannya tujuan strategis dari Indonesia. Atas dasar tersebut, artikel ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa “bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan dalam IK-CEPA?”

Artikel ini memulai pembahasan terkait hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan Kepentingan nasional Indonesia dalam IK-CEPA. Setelah itu membahas mengenai diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan dalam IK-CEPA.

## KERANGKA ANALISIS

### Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi adalah tentang penciptaan dan distribusi manfaat ekonomi dari hubungan ekonomi internasional. Jelas kepentingan nasional secara politik dan strategis akan menjadi faktor dalam negosiasi ekonomi, baik dalam hal mempromosikan tatanan dunia kapitalis yang liberal atau dalam memilih mitra negosiasi untuk perjanjian perdagangan. Kesimpulan dari perjanjian perdagangan atau ekonomi dapat dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan lapangan kerja dan dengan demikian

stabilitas politik di suatu negara (Woolcock & Bayne, 2012).

Namun sarannya tetap kesepakatan ekonomi, yang substansinya akan dibentuk oleh berbagai kepentingan sektoral domestik dan kepentingan lainnya. Dengan kata lain, tujuan politik tidak jarang menjadi faktor keputusan untuk memulai negosiasi, tetapi agenda konkrit, isi, dan pelaksanaan negosiasi akan sangat ditentukan oleh faktor ekonomi dan kepentingan (Sabaruddin, 2017:6).

Alasan utama mengapa diplomasi ekonomi menjadi lebih penting adalah bahwa hubungan ekonomi internasional sendiri menjadi lebih penting dibandingkan dengan hubungan politik/keamanan, karena globalisasi menggantikan ketergantungan yang lebih besar (Setiawan, Sulastri, Aprianto, & Maulana, 2020:4). Globalisasi telah mengurangi kemampuan masing-masing negara bagian atau bahkan koalisi atau kelompok negara untuk membentuk hasil. Sebelum globalisasi dan munculnya tantangan seperti pemanasan global, dimungkinkan untuk membuat lebih banyak perbedaan antara tujuan ekonomi domestik dan perkembangan internasional. Saat ini semakin sulit bagi pemerintah untuk memenuhi tuntutan ekonomi domestik tanpa terlibat dalam negosiasi internasional yang

ekstensif (Salsabilla Denura & Puspita Sari, 2021:9).

Diplomasi perdagangan, salah satu metode diplomasi ekonomi, memegang peranan penting dalam mengurangi hambatan perdagangan internasional. Terlepas dari adanya sistem perdagangan bebas yang telah mengurangi hambatan tarif ke level 0 atau hambatan non-tarif, pemerintah melakukan negosiasi secara bilateral, regional, dan plurilateral untuk mengurangi hambatan tarif ini ke level 0 atau hambatan non-tarif. Kuota impor, *dumping*, subsidi, standar teknis, dan undang-undang kesehatan adalah contoh hambatan non-tarif (Jemadu, 2015:7).

Diplomasi ekonomi menurut Woolcock & Bayne (2012), seperti bentuk-bentuk diplomasi lainnya, yang merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu: *decision-making* (level domestik) dan negosiasi Internasional.

*Domestic decision-making* dalam konteks diplomasi ekonomi ini lebih diartikan berfokus pada faktor struktural, seperti kekuatan relatif negara atau struktur pengaruh dalam ekonomi nasional, daripada pada proses. Akan tetapi, di mana hubungan kekuasaan seimbang, di situ lah proses *decision-making* dan negosiasi dapat menentukan hasil (Woolcock & Bayne, 2012:53).

*Domestic decision-making* ini erat kaitannya dengan kementerian atau lembaga terkait yang ingin menjalin suatu kesepakatan perdagangan, dan kementerian luar negeri mungkin kesulitan untuk menyampaikan pendapat mereka. Karena semakin banyak masalah ekonomi yang diekspos secara internasional, semakin banyak lembaga pemerintah yang terlibat. Akibatnya, negosiasi untuk mencapai pandangan yang disepakati bersama dalam pemerintahan nasional adalah langkah pertama yang penting dalam diplomasi ekonomi. Semua kepentingan yang berbeda perlu didamaikan dengan cara yang masih memungkinkan. Proses *decision-making* secara domestik yang efisien sangat penting untuk mempersiapkan dan mendukung negosiasi internasional. Setelah negosiasi selesai, tingkat domestik masih diperlukan untuk ratifikasi dan implementasi kesepakatan internasional yang dicapai. Dengan demikian dua tingkat berinteraksi satu sama lain terus-menerus.

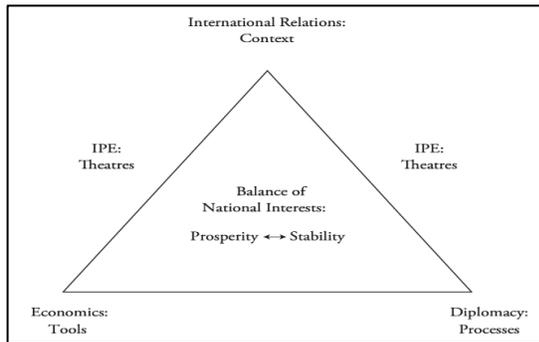
Melengkapi proses diplomasi ekonomi tersebut, Okano-Heijmans (2011) memaparkan bahwa dalam membedakan berbagai untaian diplomasi ekonomi dan untuk mulai memahami hubungan antara, dan keragaman alat di dalam, untaian tersebut dapat diidentifikasi melalui empat dimensi

pemerintah untuk bertindak tegas. Setiap pemerintah kemudian duduk dalam negosiasi internasional dengan pihak dari negara lain yang telah melalui perundingan internal yang sejajar dengan sendirinya. Masing-masing akan menginginkan hasil internasional yang menyatu dengan proses domestiknya. Namun, dalam proses negosiasi internasional, posisi domestic umumnya harus diubah untuk mencapai hasil yang disepakati secara internasional (Woolcock & Bayne, 2012:68).

penting dari diplomasi ekonomi, yaitu: *The Context; Tools; Theatres; dan Process*.

Dimensi-dimensi ini menguraikan sudut analitis yang semuanya memberikan pemahaman yang lengkap tentang diplomasi ekonomi suatu negara, yaitu, bagaimana diplomasi ekonomi tertanam dalam mengejar keseimbangan kepentingan nasional, sebagaimana yang dapat dilihat dalam Gambar 1 di bawah ini:

### Gambar 1 Kerangka analitis untuk studi tentang diplomasi ekonomi



Sumber : Okano-Heijmans (2011)

Dalam rangka membangun keseimbangan kepentingan nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama diplomasi ekonomi, keempat dimensi ini berbeda satu sama lain, tetapi saling terkait dan melengkapi (kemakmuran dan stabilitas). Topik dan sasaran analisis dalam setiap dimensi diplomasi ekonomi adalah aktor-aktor dalam situasi tersebut. Keterkaitan antara unsur yang satu dengan yang lain bisa dalam berbagai arah; tidak selalu berurutan. Salah satu contoh keterhubungan adalah seperti sebuah negara (pembuat kebijakan) dengan mempertimbangkan bagaimana kondisi internasional saat ini, terutama bagaimana posisi strategis negara dalam hubungan internasional (*context*); begitu negara menyadari konteks ini, ia akan dapat memilih alat (*tools*) diplomasi ekonomi yang paling efektif dan memilih mode praktik apa atau forum negosiasi mana yang akan diambil

(*theatre*) yang kemudian bagaimana eksekusi dari diplomasi ekonomi tersebut dilakukan (*proses*).

Jika mengacu kepada kerangka analisis yang dikemukakan oleh Okano-Heijmans (2011) diatas dapat dilihat secara konteks, bahwa terdapat kepentingan nasional yang diupayakan oleh Indonesia untuk mengejar kemakmuran dan stabilitas dari *theatre* atau mode praktik hubungan internasional dalam kerangka kerja sama IK-CEPA harus berkualitas tinggi, saling menguntungkan, dan seluas-luasnya agar dapat menciptakan keseimbangan kepentingan nasional dari kedua negara. *Tools* dan proses dari diplomasi ekonomi Indonesia ini tertuang dalam perundingan kerja sama IK-CEPA yang harus mencakup perdagangan produk dan jasa, investasi, kerjasama ekonomi, dan sektor lainnya. Selain itu, harus sangat meningkatkan jumlah perdagangan dan investasi bilateral setinggi mungkin.

### METODE PENELITIAN

Artikel ini didasarkan pada penelitian deskriptif-analitis, menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dari berbagai buku, jurnal, dan sumber *online* yang terkait dengan topik. Analisis data dalam artikel ini dilakukan melalui tiga teknik. Pertama,

reduksi data, yang mengacu pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi menjadi transkripsi. Data tersebut kemudian ditampilkan baik dalam bentuk kata maupun diagram ataupun tabel. Langkah terakhir adalah verifikasi data dengan mencari persamaan dan perbandingan untuk mendapatkan kesimpulan (Miles & Hubberman, 2014:14).

## PEMBAHASAN

### Hubungan Bilateral Indonesia dan Korea Selatan

Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan dapat diterjemahkan sebagai *theatre* atau mode praktik hubungan internasional dalam kerangka analisis dari Okano-Heijmans (2011). Sejak terjalinnya kontak antara konsulat pada tahun 1966 dan hubungan diplomatik pada tahun 1973, dapat dikatakan bahwa hubungan Korea Selatan dan Indonesia telah ditandai oleh pasang surut. Hubungan diplomatik didirikan pada tahun 1973. Pada awalnya, sulit untuk menggambarkan keadaan hubungan antara kedua negara sebagai hubungan yang memuaskan. Politik masing-masing negara dipengaruhi oleh situasi internasional yang sedang berlangsung, yang masih diwarnai oleh Perang Dingin. Saat itu politik Korea Selatan cenderung pro-Barat, sedangkan

politik Indonesia cenderung anti-Barat. Hal ini menyebabkan hubungan Korea Selatan dan Indonesia menjadi tegang.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, hubungan keduanya mulai membaik. Setelah dekade 1990-an, Korea Selatan dan Indonesia mulai berupaya meningkatkan hubungan bilateral di berbagai bidang. Mulai dari ranah politik, ekonomi, sosial budaya, dan beberapa ranah lainnya, serta bidang lainnya. Kedua negara terus mempertahankan persahabatan yang kuat hingga tahun 2006 ketika kedua negara mencapai kesepakatan untuk meningkatkan status hubungan menjadi Kemitraan Strategis. Dalam rangka memperingati 40 tahun hubungan bilateral yang telah terjalin antara kedua negara, Korea Selatan dan Indonesia telah bekerja untuk meningkatkan hubungan mereka satu sama lain. Diharapkan perbaikan ini akan terus berlanjut di berbagai bidang yang berbeda.

Hubungan yang ada antara Korea Selatan dan Indonesia dapat dicirikan sebagai salah satu dari jenisnya. Kedua pihak yang terlibat dalam kontak bilateral tersebut memang memiliki hubungan yang erat, terlihat dari mereka yang sering menyebut satu sama lain sebagai teman baik. Meski demikian, perbaikan hubungan keduanya tak lepas dari hubungan masing-masing dengan

ASEAN dan Korea Utara. Hubungan positif yang terjalin antara kedua negara hanyalah salah satu faktor dalam persamaan. Kedua belah pihak memiliki kepentingan yang serupa satu sama lain dalam sejumlah *domain* yang berbeda; Oleh karena itu, kerjasama kedua pihak semakin erat dalam rangka mencapai tujuan nasional masing-masing.

Sebagai hasil dari inisiatif yang diambil oleh Korea Selatan, keadaan hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia saat ini telah terbukti membaik. Ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa Korea Selatan mengambil inisiatif. Jalannya politik luar negeri Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kunci keberhasilan politik luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahannya. Hal ini tidak lepas dari potensi yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi. Selain itu, politik luar negeri Indonesia sedang menuju ke jalur yang kurang lebih sejalan dengan tujuan politik luar negeri Korea Selatan. Atas dasar tersebut, sekalipun Korea Selatan yang akan memprakarsai proses peningkatan status hubungan kedua negara, izin Indonesia tetap diperlukan karena itu untuk kepentingan nasional Indonesia.

### **Pembentukan IK-CEPA**

Sebelumnya, Korea Selatan terhubung dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya melalui *the ASEAN-Korea Free Trade Agreement* (AKFTA), yang ditandatangani pada Agustus 2006. AKFTA secara signifikan menurunkan tarif dan non-tarif hambatan perdagangan antara Korea Selatan dan negara-negara ASEAN, yang meningkatkan dan memperdalam integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sebagai konsekuensi langsung dari ini, Korea Selatan dan Indonesia mencapai kesepakatan pada Februari 2011 untuk membentuk *Joint Study Group* (JSG) untuk mengkaji dari pembentukan *free trade agreement* (FTA) bilateral. Baik Korea Selatan maupun Indonesia sepakat bahwa hasil kajian dari JSG tersebut akan menjadi dasar untuk memutuskan apakah pembahasan FTA bilateral akan dilanjutkan atau tidak (Joint Study Group Report, 2011:1).

Latar belakang tersebut menghasilkan langkah lanjutan kerjasama ekonomi antara kedua negara, serta untuk meningkatkan prospek keberhasilan dan manfaat kesepakatan di bawah AKFTA. Kedua negara sampai pada kesimpulan bahwa akan bermanfaat untuk membangun kerangka kerja sama *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) berdasarkan

rekomendasi dari hasil kajian JSG. Pada akhirnya, JSG menghasilkan pembentukan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*, yang merupakan perjanjian perdagangan dan investasi antara kedua negara dalam bentuk CEPA untuk memperkuat perdagangan bilateral dan hubungan ekonomi dengan menghapus hambatan perdagangan barang dan jasa yang masih ada (Joint Study Group Report, 2011:2).

IK-CEPA tidak hanya akan menghasilkan peningkatan dan penguatan sektor perdagangan dan investasi kedua negara, tetapi juga akan menghasilkan kerangka kelembagaan yang komprehensif untuk memperluas kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. IK-CEPA menekankan pada konsep tiga pilar utama, dengan mempertimbangkan struktur ekonomi yang khas dari setiap negara, yaitu: 1) Akses pasar; 2) Fasilitasi perdagangan dan investasi; dan 3) Kerjasama ekonomi, termasuk peningkatan kapasitas. Akses pasar mengacu pada proses suatu negara diizinkan untuk berpartisipasi dalam pasar yang ada (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Bilateral, 2021).

Korea Selatan dan Indonesia mengakui bahwa FTA bilateral yang lebih kuat akan bermanfaat bagi kedua ekonomi, dan mereka

mencapai kesepakatan untuk mengejar perjanjian perdagangan bebas bilateral guna memperluas daftar komoditas yang dibebaskan dari tarif, dan mempercepat laju penghapusan tarif dari komponen bilateral Perjanjian Perdagangan Bebas Korea-ASEAN. Di sisi lain, Indonesia memiliki sejumlah besar potensi pertumbuhan yang belum dimanfaatkan. Sekitar tahun 2030, diperkirakan oleh sejumlah besar analis ekonomi bahwa Indonesia akan memiliki ekonomi terbesar ketujuh di dunia (Oberman, Dobbs, Budiman, Thomson, & Rosse, 2012). Berdasarkan hal tersebut, di tahun-tahun mendatang, kedua negara akan bekerja sama dalam berbagai proyek yang semakin beragam. Mengingat hubungan ekonomi yang berkembang antara kedua negara dan saling melengkapi yang luar biasa yang ada di antara mereka, kedua negara mengakui potensi keuntungan yang mungkin datang dari IK-CEPA. Tujuan pemerintah Korea Selatan adalah agar IK-CEPA membuka pasar untuk teknologi informasi, otomotif, dan barang baja (Dae-Chang, 2013:48).

Saat ini, sebagian besar negara di dunia sepakat bahwa perdagangan bebas merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran. Selanjutnya, jika perdagangan bebas tumbuh menjadi hubungan kemitraan

yang komprehensif antara dua negara, ruang lingkup hubungan meluas melampaui perdagangan bebas (Rompas, 2019:1907). IK-CEPA merupakan kesepakatan komprehensif antara kedua negara dalam kategori perdagangan barang, jasa, investasi, asal penyediaan barang, dan kerja sama ekonomi. Selain itu, kesepakatan IK-CEPA akan memberikan akses pasar yang lebih luas kepada Korea dan Indonesia dibandingkan AKFTA.

Inisiasi diskusi untuk IK-CEPA antara Indonesia dan Korea Selatan berlangsung pada Juli 2012. IK-CEPA memiliki tujuh *working group* yang berbeda di bawah lingkupnya, yakni Perdagangan Barang, Ketentuan Asal Barang, Prosedur Kepabeanan Dan Fasilitasi Perdagangan, Jasa, Investasi, Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas, Masalah Hukum dan Kelembagaan, dan sebagainya (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Bilateral, 2021). Sebelum perundingan IK-CEPA mendekati ronde ketujuh, tidak ada pergerakan maju yang signifikan akibat dari pertemuan-pertemuan tersebut. Sepanjang jalannya perundingan yang berlangsung antara tahun 2012 hingga 2014, Indonesia dan Korea Selatan tidak dapat mencapai kesepakatan karena ketidakseimbangan dalam pemberian konsesi perundingan,

khususnya di bidang: 1) *Trade in goods (Package Deal* untuk akses pasar produk barang), konsesi penurunan tarif yang diberikan oleh Indonesia dan Korea Selatan dianggap belum mengakomodir kepentingan masing-masing. 2) Korea Selatan belum mampu memberikan jaminan investasi dengan mencantumkan nilai investasi dalam perjanjian, khususnya dalam perluasan industri otomotif dan elektronik. Menurut pemerintah Korea Selatan, keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan swasta, sehingga pemerintah tidak bisa mengeluarkan jaminan investasi seperti yang diminta pemerintah Indonesia. 3) Kerjasama ekonomi dan peningkatan kapasitas: empat CCB telah disetujui dengan persyaratan pembukaan pasar di bidang-bidang seperti: otomotif, perikanan, konstruksi, dan teknik, serta layanan wisata dan budaya (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Bilateral, 2021).

Menurut Imam Pambagyo, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, alasan lain terkait pergantian kepala negara RI, yang menyatakan para perunding Indonesia yang menangani perundingan IK-CEPA tidak mendapatkan kejelasan kebijakan yang layak mereka terima. dengan pergantian kepala negara Indonesia. Akibatnya, kesepakatan tidak

tercapai, dan pembicaraan IK-CEPA kemungkinan akan berakhir (Safitri, 2021).

Meskipun ada beberapa hambatan dalam kemitraan ekonomi kedua negara, Indonesia dan Korea Selatan tetap menjadi dua mitra dagang terpenting dunia. Hubungan antara Indonesia dan Korea telah meningkat secara signifikan sebagai akibat langsung dari pemilihan kepala negara baru di kedua negara baru-baru ini. Pada tahun 2018, dalam memperingati 45 tahun hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan, Presiden Jokowi dan Presiden Moon Jae-in sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan mengaktifkan kembali perundingan IK-CEPA. Hal tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh Menteri Perdagangan kedua negara dengan memulai kembali perundingan IK-CEPA pada 19 Februari 2019 (VOI, 2020).

Pada bulan April dan Mei 2019, perundingan putaran kedelapan berlangsung di Seoul. Kali ini, Indonesia dan Korea Selatan memutuskan untuk mengurangi kerangka negosiasi guna memenuhi target di Oktober 2019 untuk menyimpulkan isi pembahasan IK-CEPA. Batas waktu ini adalah untuk penyelesaian negosiasi IK-CEPA (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Bilateral, 2021). Sebagai hasil dari diskusi putaran ke-9, yang berlangsung

di Seoul dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2019, setelah melakukan penyelidikan terhadap industri yang harus dimasukkan dalam pembahasan *Cooperation and Capacity Building (CCB)*, baik Indonesia dan Korea Selatan datang ke kesimpulan bahwa mereka harus terus membahas *draft* Bab tentang Kerjasama Ekonomi pada putaran pembicaraan mendatang untuk WG CCB (Kementerian Perdagangan, 2020).

Indonesia dan Korea Selatan telah mencapai konsensus pada diskusi putaran kesepuluh IK-CEPA, yang berlangsung pada 8-10 Oktober 2019, di Bali. Sebagai konsekuensi dari konsensus ini, negosiasi pada prinsipnya dianggap selesai. Selain itu, kedua pihak mencapai kesepakatan bahwa penyelesaian diskusi IK-CEPA akan diumumkan bersama pada pertemuan presiden kedua negara. Pada 25 November 2019, di Busan, Korea Selatan, di sela-sela KTT ASEAN-RoK, para pihak yang terlibat dalam Perundingan IK-CEPA berkumpul untuk menandatangani Deklarasi Bersama tentang Kesimpulan Akhir Negosiasi. Selain itu, Indonesia dan Korea akan melanjutkan proses legal cleansing terhadap teks perjanjian agar IK-CEPA dapat segera dilaksanakan (Septiari, 2019).

Menteri Perdagangan Indonesia Agus Suparmanto dan *Minister of Trade, Industry,*

*and Energy* (MOTIE) Korea Selatan Sung Yun-mo menandatangani kesepakatan Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership* (IK-CEPA) pada 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan (VOI, 2020).

### **Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam IK-CEPA**

Kesepakatan perundingan Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership* (IK-CEPA) sebagai bentuk dorongan untuk meningkatkan interaksi perdagangan dan ekonomi dengan *focal point* pada fasilitasi investasi dan perdagangan, akses pasar perdagangan barang dan jasa, dan kerja sama serta pembentukan usaha, menandai hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Kepentingan nasional yang dimiliki Indonesia melalui IK-CEPA ini secara garis besar ingin meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat Indonesia di pasar internasional. Kerja sama ekonomi bilateral dalam kerangka IK-CEPA ini menjadi salah satu *tools* dan proses dari diplomasi ekonomi Indonesia untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui perdagangan dan investasi.

### ***Perdagangan Indonesia-Korea Selatan***

IK-CEPA adalah bukti bahwa kedua negara siap untuk meningkatkan hubungan keuangan di tengah iklim ekonomi yang menantang saat ini yang melanda ekonomi global. Perjanjian IK-CEPA bertujuan untuk mencapai kemitraan ekonomi yang komprehensif dan saling menguntungkan antara Korea dan Indonesia. Ini akan dicapai dengan memfasilitasi perluasan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi yang ada antara kedua negara. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara dan mempromosikan kemitraan yang akan diuntungkan dari hubungan ekonomi yang semakin terintegrasi. Melalui promosi kerjasama ekonomi dalam berbagai disiplin ilmu, kesepakatan tersebut akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara. Hal ini, pada gilirannya, akan berkontribusi pada pembentukan lebih lanjut hubungan politik, sosial, dan budaya, serta kerja sama internasional.

Tingkat liberalisasi perdagangan produk yang diupayakan Indonesia sekitar 92 persen, sedangkan tingkat yang ditargetkan untuk Korea adalah 95 persen. Jumlah ini lebih banyak dari yang disepakati dalam AKFTA. Di ranah perdagangan internasional termasuk pertukaran komoditas, akses pasar Indonesia untuk produk industri, perikanan,

dan pertanian di pasar Korea Selatan akan ditingkatkan. Hal ini memungkinkan Korea Selatan mendapatkan akses pasar untuk komoditas mentah, yang pada gilirannya akan mendorong investasi Korea Selatan di Indonesia.



Jumlah seluruh barang dan jasa yang diperdagangkan Indonesia dengan Korea Selatan pada tahun 2021 adalah sebesar 18,47 miliar dolar AS. Nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan pada tahun tersebut sebesar 8,98 miliar, sedangkan nilai impor Indonesia dari Korea Selatan sebesar 9,42 miliar dolar AS. Sebagai akibat langsung dari hal tersebut, neraca perdagangan Indonesia-Korea Selatan pada tahun 2021 menunjukkan defisit sebesar 446,7 juta dolar AS. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2020 ketika neraca perdagangan Indonesia-Korea Selatan mengalami defisit sebesar 341,8 juta dolar AS, dan terjadi pada tahun 2019 yang mengalami defisit sebesar 1,18 miliar dolar

Namun meskipun begitu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia selalu mencatatkan defisit neraca perdagangan dengan Korea Selatan dalam tiga tahun terakhir, sebagaimana yang digambarkan dalam Grafik 1 di bawah ini

**Grafik 1 Nilai dan Neraca Perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan (2017-2021)**

Sumber: Dhini (2022)

AS. Sementara itu, Indonesia mencatat surplus 79,1 juta dolar AS pada 2017 dan surplus 451 juta dolar AS pada 2018 (Dhini, 2022).

Karena adanya penetapan batasan *normal track*, *sensitive list*, dan *highly sensitive list* di bawah regulasi perdagangan barang ASEAN-KOREA *Free Commerce Agreement* (AKFTA), maka nilai perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan mengalami penurunan. *Normal track rule* (NT) adalah penghitungan pengurangan kategori produk berdasarkan kesiapan menghadapi liberalisasi guna mempercepat penerapan pengurangan bea masuk. Pengurangan ini ditentukan dengan menggunakan sensitivitas produk. Produk yang diproduksi di NT dikenakan tarif impor mulai dari 0 hingga 5 persen. Aturan untuk

*sensitive list*, dan *highly sensitive list* adalah penentuan pengurangan kategori produk berdasarkan sensitivitasnya. Karena kategori produk ini tidak siap menghadapi liberalisasi, pengurangan bea masuk harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama. Produk SL dikenakan bea masuk 20 persen, tetapi produk HSL dikenakan bea masuk 50 persen (Setiawan, 2014).

Berdasarkan kerangka regulasi perjanjian kerjasama AKFTA antara Indonesia dan Korea Selatan, kedua negara secara bertahap menyepakati strategi pemotongan dan penghapusan tarif/pajak impor dan pembatasan (non-tarif) lainnya. Korea Selatan wajib menghapus tarif kategori *normal track* 0 persen untuk produk ekspor Indonesia ke Korea Selatan. Produk-produk tersebut antara lain produk hewan hidup, ikan, sayuran, minyak sawit, produk kimia, produk kertas, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit, karet, dan produk kayu.

Sebagai tanggapan mengenai penghapusan produk ekspor Indonesia ke Korea Selatan, Pemerintah Indonesia wajib memberlakukan program konsesi tarif yang akan menurunkan bea masuk antara 0 hingga 5 persen untuk mendapatkan kompensasi atas keputusan Korea Selatan penghapusan tarif barang ekspor Indonesia. Namun apabila

dicermati lebih dalam, peraturan tersebut bersifat mengikat bagi Indonesia yang diwajibkan mengenakan tarif/bea masuk sebesar Rp 0-5 persen atas produk ekspor Korea Selatan ke Indonesia. Sedangkan dari Korea Selatan, kategori produk *high sensitive list* (HSL) dikenakan bea masuk sebesar 50 persen dari nilai produk. Artinya adalah, Korea Selatan dapat memilih barang Indonesia tertentu untuk HSL, dan sebaliknya. Hal ini dilakukan berdasarkan nilai total impor Korea Selatan dari Indonesia. Setelah ditetapkan norma ini sebagai standar, Korea Selatan diberi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari harga di kategori produk HSL.

Hal ini yang tentunya berusaha dihindari oleh Indonesia dalam mencapai kesepakatan kerja sama IK-CEPA. Dalam kesepakatan IK-CEPA yang telah dicapai, Korea Selatan akan menurunkan tarif impor dari Indonesia sebesar 97,3 persen berdasarkan IK-CEPA, sedangkan Indonesia akan menurunkan tarif impor dari Korea Selatan sebesar 94 persen. Korea Selatan akan menghapus 95,54 persen hambatan tarif dalam perdagangan barang, sementara Indonesia akan menghapus 92,06 persen pos tarif. Tarif telah dihapus pada barang-barang asam stearat Korea Selatan, *T-shirt*, *blockboard*, minyak pelumas, buah-buahan

kering, dan rumput laut. Sementara itu, Indonesia akan menghapus pajak untuk barang-barang seperti *gear box* mobil, trotoar, perapian, dan ubin dinding. Sebelumnya, persentase pembebasan masing-masing adalah 90,2 persen dan 80,1 persen berdasarkan ketentuan Perjanjian Perdagangan Bebas Korea-ASEAN (VOI, 2020).

Upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam kerja sama IK-CEPA ini bertujuan untuk dapat memperoleh keuntungan bersama, Indonesia memberikan usulan untuk memperluas kerja sama dengan menambah tiga sektor kerja sama baru pada *Chapter on Economic Cooperation* IK-CEPA yaitu sektor kesehatan, energi dan sumber daya mineral, serta layanan terkait sektor kesehatan.

Pada perundingan putaran ke-9 dalam *Working Group on Cooperation and Capacity Building Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) pada 28-30 Agustus 2019, dalam IK-CEPA *Chapter on Economic Cooperation*, Indonesia memaparkan ide-ide dan potensi untuk perluasan kerja sama di bidang industri, kesehatan, dan perikanan. Pemerintah Indonesia ingin menekankan bahwa inisiatif dan kerja sama yang diuraikan dalam bab ini tidak akan menduplikasi atau

menggantikan proyek atau kerja sama lain yang telah berlangsung antara Indonesia dan Korea.

Indonesia mengusulkan adanya *Framework Document* yang memuat daftar dan penjelasan bidang kerja sama secara terperinci pada sektor industri. Hal ini dikarenakan baik Indonesia dan Korea Selatan ingin adanya informasi yang transparan mengenai potensi sektor industri yang dimiliki oleh kedua negara. Hasil dari peningkatan bidang kerja sama IK-CEPA pada sektor Industri menunjukkan potensi perdagangan pada sektor industri yang dapat dilihat pada Tabel 1 perdagangan Indonesia – Korea Selatan tahun 2021 di bawah ini:

#### **Tabel 1 Perdagangan Indonesia – Korea Selatan Tahun 2021**

Sumber: Kedutaan Besar republik Korea Selatan (2022)

Di bidang kesehatan, Indonesia mempresentasikan proposal mengenai “*Enhancement of Korean Investment on Healthcare Industry through Capacity Building to Improve Medical Devices Industries and Human Resources for Health*”. Indonesia menekankan bahwa investasi Korea dalam industri perawatan kesehatan akan membawa manfaat bagi kedua negara yang kerja sama peningkatan kapasitasnya akan mengembangkan kemitraan publik dan swasta dari kedua negara. Di sektor perikanan, Indonesia mempresentasikan konsep dasar untuk kerja sama di bidang pengolahan perikanan dan pengembangan industri makanan laut, serta Pertanian Artemia Akuakultur.

Diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dalam kerangka kerja sama IK-CEPA ini memiliki target perdagangan secara keseluruhan mencapai 20 miliar dolar AS dalam jangka waktu tiga tahun setelah berlakunya kerja sama IK-CEPA ini. Akan tetapi, meskipun kesepakatan IK-CEPA ini telah tercapai pada 2019 lalu, sampai saat ini kerja sama IK-CEPA masih belum berlaku dikarenakan lambatnya proses ratifikasi perjanjian kerja sama di kedua negara. atar dasar tersebut, diperlukan percepatan

**Ekspor Korea Selatan Ke Indonesia (2021)**      **Impor dari Indonesia ke Korea Selatan (2021)**

	Jenis Barang	Nilai	Jenis Barang	Nilai
1.	Resin Sintesis	7.6	Batu Bara	16.7
2.	Pelat Baja	7.4	Gas	11.6
3.	Produk Minyak Bumi	6.9	Tambang Tembaga	7.9
4.	Tekstil	3.9	Bahan Tanaman	6.1
5.	Semi Konduktor	3.6	Pakaian	5.2
6.	Karet Sintesis	3.5	Peralatan Video	5.2

ratifikasi agar dapat memudahkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Korea Selatan.

### ***Investasi Indonesia-Korea Selatan***

Perdagangan yang berjalan baik yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dapat mendukung iklim investasi yang dapat menguntungkan kedua negara. Statistik mengungkapkan bahwa Indonesia juga merupakan tujuan investasi Korea yang signifikan di luar negeri, dengan nilai investasi 8,5 miliar dolar AS, yang selanjutnya mendukung gagasan bahwa

Korea Selatan adalah sumber investasi yang vital bagi Indonesia. Menurut statistik yang ada, Indonesia menempati peringkat kedua setelah Vietnam di antara delapan negara

anggota ASEAN (19,10%), dan ketiga dari 91 negara yang menjadi lokasi investasi populer bagi orang Korea di seluruh dunia (7,47%)

**Tabel 2**  
**Nilai investasi korea Selatan di Indonesia (2012-2018)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Nilai</b>	1,218.7	1,946.4	2,205.5	1,126.5	1,213	1,065.8	2,024.6

Sumber: Kedutaan Besar Republik Korea Selatan (2022)<sup>1</sup>

Dari 144 negara penyumbang investasi asing langsung di Indonesia, Korea Selatan menempati urutan keempat berdasarkan total nilai realisasi investasi yang dilakukan antara tahun 2012 hingga semester pertama 2018. Menurut data Kedutaan Besar Republik Korea Selatan (2022), lihat Tabel 2, hingga akhir tahun 2018, tercatat sebanyak 2.160 proyek yang berasal dari Korea Selatan telah selesai dikerjakan, dengan total nilai realisasi investasi sebesar 2,024.6 juta dolar AS.

Investasi yang telah dicapai selama ini adalah pabrik plastik hulu oleh PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) dengan nilai lebih dari 60 triliun Rupiah atau setara dengan 4 miliar dolar AS. Realisasi potensi ini akan diwujudkan dalam bentuk pembangunan mesin *naphtha cracker* atau pabrik yang mampu mengubah minyak mentah menjadi

*ethylene* dengan kemampuan kapasitas 1 juta ton per tahun.

Pabrik Lotte di Amerika Serikat memiliki kapasitas produksi yang sebanding dengan yang satu ini. Pembangunan mesin tersebut diharapkan selesai pada triwulan pertama di tahun 2025, dan produksi untuk dijual di pasar komersial diperkirakan akan dimulai pada triwulan kedua di tahun yang sama.

Pendapatan tahunan yang ditargetkan LCI dari investasi ini diproyeksikan menjadi 2 miliar dolar AS. Pasalnya, perusahaan ini akan diintegrasikan dengan produsen *polyethylene* (PE) yakni PT Lotte Chemical Titan Nusantara Tbk.

Selain Lotte, perusahaan asal Korea Selatan lainnya, PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI), merealisasikan investasinya di Indonesia

sebesar 15 miliar dolar AS. Perusahaan ini berniat mendirikan pabrik produksi mobil listrik atau *electric vehicle* (EV).

Perlu disadari bahwa peluang untuk meningkatkan dan mengembangkan kerja sama diantara Indonesia dengan Korea Selatan ini memiliki potensi yang besar. Kembali ke manfaat menjalin kerjasama IK-CEPA, salah satunya adalah investasi bilateral yang lebih besar antara Indonesia dan Korea. Kedua pihak mengharapkan bahwa IK-CEPA akan memberikan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi di kedua negara. Investasi Korea Selatan terkonsentrasi di sektor bangunan, pertambangan, energi, transportasi, telekomunikasi, dan jasa profesional.

Investasi Korea Selatan di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan investasi di Vietnam (3.162 juta dolar AS) yang telah menerapkan perjanjian CEPA dengan Korea (ASEAN-Korea Center, 2018). Korea memprediksi pertumbuhan investasi di Indonesia sebagai konsekuensi dari diaktifkannya kembali IK-CEPA, karena Indonesia memiliki banyak kekayaan alam dan pasar yang kompeten untuk distribusi barang-barang Korea. Perjanjian IK-CEPA memberikan perlindungan investasi seperti nondiskriminasi, perlakuan adil dan setara,

*Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), dan peningkatan akses pasar.

Perjanjian kerja sama ekonomi dalam kerangka IK-CEPA juga mengutamakan investasi dua arah. Dengan demikian, penanaman modal asing langsung Korea Selatan di Indonesia diharapkan dapat meningkat, sehingga membuka peluang bagi Indonesia untuk berinvestasi di Korea Selatan. IK-CEPA seharusnya membuka babak baru kemitraan kedua negara dengan memperkuat kerja sama ekonomi untuk bersama-sama memetik manfaat ekonomi global.

## SIMPULAN

Diplomasi ekonomi Indonesia dalam kerja sama IK-CEPA ini dilakukan sebagai bentuk penyeimbang kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan Indonesia dalam IK-CEPA ini dapat dilihat dari proses diplomasi ekonomi Indonesia yang mengedepankan keuntungan bersama dalam hal perdagangan dan investasi. Dalam artikel ini menemukan bahwa Indonesia mendorong perluasan kerja sama IK-CEPA ke dalam beberapa sektor yang tujuannya adalah dapat meningkatkan nilai perdagangan dan investasi diantara Indonesia dan Korea Selatan.

## REFERENSI

- Cholif, U. M. (2022). *South Korea ' s Interests behind the Reactivation of IK-CEPA Negotiations with Indonesia*. 9(1), 20–36.
- Dae-Chang, K. (2013). The 40th Anniversary Of Economic Relations Between Korea And Indonesia. *Economic Relations With Southeast Asia*. Retrieved from [http://keia.org/sites/default/files/publications/koreaseconomy\\_2013\\_chapter6.pdf](http://keia.org/sites/default/files/publications/koreaseconomy_2013_chapter6.pdf)
- Dhini, V. A. (2022, February 23). Neraca Perdagangan RI-Korsel Defisit Terus sejak 2019 | Databoks. Retrieved June 27, 2022, from [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id) website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/23/neraca-perdagangan-ri-korsel-defisit-terus-sejak-2019>
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Bilateral. (2021, December 8). IK-CEPA: Langkah Strategis Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia-Korea ke Tahap yang Lebih Tinggi. Retrieved June 24, 2022, from Kementerian Perdagangan website: <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/ik-cepa-langkah-strategis-perkuat-hubungan-bilateral-indonesia-korea-ke-tahap-yang-lebih-tinggi>
- Jemadu, A. (2015). Diplomasi Ekonomi Indonesia: Menuju Solusi yang Lebih Komprehensif. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 30(2).
- Joint Study Group Report. (2011). Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). In *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. Jakarta.
- Kedutaan Besar Republik Korea Selatan. (2022, January 31). Perdagangan dan Investasi Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia. Retrieved June 28, 2022, from Kedutaan Besar Republik Korea Selatan Untuk Republik Indonesia website: [https://overseas.mofa.go.kr/id-id/wpge/m\\_2718/contents.do](https://overseas.mofa.go.kr/id-id/wpge/m_2718/contents.do)
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020, December 22). Kerjasama Bilateral Indonesia - Korea Selatan. Retrieved March 25, 2021, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia website: [https://kemlu.go.id/seoul/en/pages/hubungan\\_bilateral/558/etc-menu](https://kemlu.go.id/seoul/en/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu)
- Kementerian Perdagangan. (2020, December 18). Indonesia–Korea CEPA: Tonggak Baru Hubungan Ekonomi Bilateral Kedua Negara. Retrieved June 24, 2022, from Kementerian Perdagangan website: [https://www.kemendag.go.id/storage/article\\_uploads/y6gvyceDAkZhlGDHnFkJWR3YKZ6jVcr0EoEuDOB5.pdf](https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/y6gvyceDAkZhlGDHnFkJWR3YKZ6jVcr0EoEuDOB5.pdf)
- Miles, M. B., & Hubberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc.
- Muchsya, A. D. (2020). *Kerja Sama Korea Selatan-Indonesia Dalam Hubungan Special Strategic Partnership Di Bidang Ekonomi Tahun 2018-2019* (Universitas Islam Negeri Syarif

- Hidayatullah). Retrieved from [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56866/1/AUDREY\\_DYLANIA\\_MUCHSYA.FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56866/1/AUDREY_DYLANIA_MUCHSYA.FISIP.pdf)
- Oberman, R., Dobbs, R., Budiman, A., Thomson, F., & Rosse, M. (2012). The archipelago Economy: Unleashing Indonesia's potential. Retrieved June 27, 2022, from McKinsey & Company website: [https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured\\_insights/asia\\_pacific/the\\_archipelago\\_economy/mgi\\_unleashing\\_indonesia\\_potential\\_executive\\_summary.ashx](https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured_insights/asia_pacific/the_archipelago_economy/mgi_unleashing_indonesia_potential_executive_summary.ashx)
- Okano-Heijmans, M. (2011). Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies. In A. G. van Bergeijk, Peter, M. Okano-Heijmans, & J. Melissen (Eds.), *Economic Diplomacy, Economic and Political Perspectives*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Rompas, R. P. (2019). Hubungan Dagang Internasional Indonesia dan Korea Selatan, 2011-2016. *Calyptra*, 8(1), 1906-1920.
- Sabaruddin, S. S. (2017). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 69. <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2545.69-90>
- Safitri, M. N. (2021). *Faktor-Faktor Pendorong Reaktivasi Perundingan Indonesia-Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* (Universitas Sriwijaya). Retrieved from [https://repository.unsri.ac.id/56682/50/RAMA\\_84201\\_07041381621159\\_0020055902\\_0018058402\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/56682/50/RAMA_84201_07041381621159_0020055902_0018058402_01_front_ref.pdf)
- Salsabilla Denura, J., & Puspita Sari, V. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Bangladesh: Studi Kasus Ekspor Gerbong Kereta. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 212-227. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.31172.33468>
- Septana, D. B., & Winanti, P. S. (2017). *Hubungan Kerjasama Ekonomi Bilateral Indonesia dengan Korea Selatan Melalui Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* (Universitas Gajah Mada). Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/108670>
- Septiari, D. (2019). It's a wrap: Indonesia, South Korea announce completion of CEPA negotiations.
- Setiawan, A., Sulastri, E., Aprianto, E., & Maulana, I. (2020). Analisis Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Asia Tengah. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ 7 Oktober 2020*. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/8866/5212>
- Tiara, A. C. (2017). *Faktor-faktor Yang Memengaruhi Terhentinya Perundingan Indonesia-Korea*

*Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) Di Tahun 2014* (Universitas Katolik Parahyangan). Retrieved from [http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6398/Cover -Bab1-3314177sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6398/Cover-Bab1-3314177sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

VOI. (2020). IK-CEPA Is Officially Signed, Indonesia-South Korea Strengthens Trade Relations.

Woolcock, S., & Bayne, N. (2012). Economy Diplomacy. In A. F. . Cooper, J. Heine, & R. Thakur (Eds.), *The oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford: Oxford University Press.